

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoritis

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam menyusun suatu anggaran harus berkaitan antara dana-dana yang akan dikeluarkan dan tujuan yang akan dicapai. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berisikan daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara dalam satu tahun anggaran (1 Januari – 31 Desember).

Suparmoko (2002 : 26) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan anggaran ialah suatu alat perencanaan tentang penerimaan dan pengeluaran di masa yang akan datang, umumnya disusun dalam jangka waktu satu tahun. Sedangkan menurut Departemen Keuangan (2004 : 2), Pasal 1 ayat (7) UU Nomor 17 Tahun 2003, APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR. APBN merupakan instrument untuk membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan

nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum.

Dalam menyusun APBN, perencanaan alokasi belanja negara diarahkan untuk mendorong alokasi sumber-sumber ekonomi agar dapat digunakan secara produktif, yaitu terjadinya realokasi faktor-faktor produksi yang akan digunakan secara lebih efisien dan efektif untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi khususnya dalam stabilitas perekonomian nasional. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyusun langkah-langkah peningkatan kualitas belanja negara dengan mengutamakan belanja modal sebagai pendukung pendanaan bagi kegiatan pembangunan, mengefisienkan pendanaan bagi kegiatan-kegiatan yang bersifat konsumtif, dan menghindari peningkatan pengeluaran wajib. Belanja modal difokuskan untuk mendukung program infrastruktur, mendukung target pertumbuhan ekonomi, dan perbaikan kesejahteraan rakyat, infrastruktur pertanian, dan infrastruktur energi serta komunikasi (Lestari, 2011).

Prinsip APBN sebelum tahun 1999 adalah anggaran berimbang dinamis, dimana jumlah penerimaan negara selalu sama dengan pengeluaran negara, dan jumlahnya diupayakan meningkat dari tahun ke tahun. Sejak tahun 1999 hingga sekarang, prinsip anggaran yang digunakan adalah anggaran surplus/defisit. Sejalan dengan itu, format dan struktur APBN berubah dari T-Account menjadi I-Account. Perbedaan antara prinsip anggaran surplus/defisit dengan prinsip anggaran berimbang adalah bahwa : 1) Pinjaman luar negeri tidak dicatat sebagai sumber penerimaan, melainkan sebagai sumber pembiayaan, dan 2) Defisit anggaran ditutup dengan sumber pembiayaan dalam negeri ditambah sumber

pembiayaan luar negeri (bersih). Apabila belanja lebih kecil daripada anggaran, disebut sebagai anggaran surplus. Sebaliknya, apabila anggaran lebih kecil daripada pengeluaran atau pengeluaran lebih besar daripada anggaran, disebut anggaran defisit. Masing-masing kebijakan anggaran mempunyai kecenderungan tersendiri. Pada sistem anggaran berimbang misalnya, perekonomian cenderung berjalan stabil jika dibandingkan dengan kebijakan anggaran defisit dan surplus.

APBN terdiri dari pendapatan negara dan hibah, belanja negara, dan pembiayaan adalah merupakan instrumen utama kebijakan fiskal untuk mengarahkan perekonomian nasional dan menstimulus pertumbuhan ekonomi sehingga besarnya penyerapan akan berdampak pada semakin besarnya daya dorong terhadap pertumbuhan dan sebaliknya. Kebijakan APBN diharapkan dapat merespon dinamika rakyat, baik yang terkait dengan perkembangan perekonomian secara luas, maupun perkembangan kehidupan rakyat itu sendiri, sehingga diperlukan kebijakan fiskal yang fleksibel (Lestari, 2011).

2. Defisit APBN

Menurut Rahardja dan Manurung (2004) defisit anggaran adalah anggaran yang memang direncanakan untuk defisit, sebab pengeluaran pemerintah direncanakan lebih besar dari penerimaan pemerintah ($G > T$). Anggaran yang defisit ini biasanya ditempuh bila pemerintah ingin menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Hal ini umumnya dilakukan bila perekonomian berada dalam kondisi resesi. Definisi dari defisit anggaran menurut Samuelson dan Nordhaus adalah suatu anggaran dimana terjadi pengeluaran lebih besar dari pajak. Sedangkan menurut Dornbusch, Fischer dan Startz defisit anggaran adalah selisih antara jumlah uang

yang dibelanjakan pemerintah dan penerimaan dari pajak. Dornbusch, Fischer, dan Startz mengatakan bahwa Pemerintah secara keseluruhan, terdiri dari Departemen Keuangan bersama Bank Sentral dapat membiayai defisit anggarannya dengan dua cara yaitu dengan menjual obligasi maupun "mencetak uang". Bank Sentral dikatakan "mencetak uang" ketika Bank Sentral meningkatkan stok uang primer, umumnya melalui pembelian pasar terbuka dengan membeli sebagian utang yang dijual Departemen Keuangan.

Ada dua kemungkinan jenis hubungan yang terjadi antara defisit anggaran dengan pertumbuhan uang. Pertama, dalam jangka pendek kenaikan defisit yang disebabkan karena kebijakan ekspansioner akan cenderung menaikkan suku bunga nominal dan riil. Jika Bank Sentral menjaga supaya suku bunga tidak naik, maka dilakukan tindakan dengan meningkatkan pertumbuhan uang. Kedua, pemerintah dengan sengaja menaikkan persediaan uang dengan maksud agar mendapat penerimaan pemerintah dalam jangka panjang (Suhamo, 2007).

Terdapat beberapa definisi defisit. Secara konvensional, defisit dihitung berdasarkan selisih antara total belanja dengan total pendapatan termasuk hibah. Sementara itu, pengertian kedua adalah defisit moneter. Defisit moneter adalah selisih antara total belanja pemerintah (di luar pembayaran pokok hutang) dengan total pendapatan (di luar penerimaan hutang). Pengertian ketiga adalah defisit operasional, yaitu defisit moneter yang diukur dalam nilai riil dan bukan nilai nominal. Definisi yang terakhir adalah defisit primer. Defisit primer merupakan selisih antara belanja (di luar pembayaran pokok dan bunga hutang) dengan total pendapatan. Selain itu, masih terdapat beberapa definisi dari defisit dan sangat

tergantung pada kriteria yang digunakan serta tujuan analisis. Biasanya pilihan konsep defisit yang tepat tergantung oleh beberapa faktor, antara lain: jenis ketidakseimbangan yang terjadi, cakupan pemerintah (pemerintah pusat, konsolidasi pemerintah, dan sektor publik), metode akuntansi (*cash dan accrual basis*), dan status dari *contingent liabilities* (Endah, 2010).

a. Sebab-sebab Terjadinya Defisit Anggaran Pemerintah

1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, untuk mempercepat pembangunan diperlukan investasi yang besar dan dana yang besar pula. Apabila dana dalam negeri tidak mencukupi, biasanya negara melakukan pilihan dengan meminjam ke luar negeri untuk menghindari pembebanan warga negara apabila kekurangan itu ditutup melalui penarikan pajak.
2. Rendahnya daya beli masyarakat, masyarakat di negara berkembang seperti Indonesia yang mempunyai pendapatan per kapita rendah, dikenal mempunyai daya beli yang rendah pula. Sedangkan barang-barang dan jasa-jasa yang dibutuhkan, harganya sangat tinggi karena sebagian produksinya mempunyai komponen impor, sehingga masyarakat yang berpendapatan rendah tidak mampu membeli barang dan jasa tersebut. Barang dan jasa tersebut misalnya listrik, sarana transportasi, BBM, dan lain sebagainya. Apabila dibiarkan saja menurut mekanisme pasar, barang-barang itu pasti tidak mungkin terjangkau oleh masyarakat dan mereka akan tetap terpuruk. Oleh karena itu, negara memerlukan pengeluaran untuk mensubsidi barang-barang tersebut agar masyarakat miskin bisa ikut menikmati.

3. Pemerataan pendapatan masyarakat, pengeluaran ekstra juga diperlukan dalam rangka menunjang pemerataan di seluruh wilayah. Indonesia yang mempunyai wilayah sangat luas dengan tingkat kemajuan yang berbeda-beda di masing-masing wilayah. Untuk mempertahankan kestabilan politik, persatuan dan kesatuan bangsa, negara harus mengeluarkan biaya untuk misalnya, pengeluaran subsidi transportasi ke wilayah yang miskin dan terpencil, agar masyarakat di wilayah itu dapat menikmati hasil pembangunan yang tidak jauh berbeda dengan wilayah yang lebih maju. Kegiatan itu misalnya dengan memberi subsidi kepada pelayaran kapal perintis yang menghubungkan pulau-pulau yang terpencil, sehingga masyarakat mampu menjangkau wilayah-wilayah lain dengan biaya yang sesuai dengan kemampuannya.
4. Melemahnya nilai tukar, Indonesia yang sejak tahun 1969 melakukan pinjaman luar negeri, mengalami masalah apabila ada gejolak nilai tukar setiap tahunnya. Masalah ini disebabkan karena nilai pinjaman dihitung dengan valuta asing, sedangkan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman dihitung dengan rupiah. Apabila nilai tukar rupiah menurun terhadap mata uang dollar AS, maka yang akan dibayarkan juga membengkak. Sebagai contoh APBN tahun 2000, disusun dengan asumsi kurs rupiah terhadap dollar AS sebesar Rp. 7.100,-, dalam perjalanan tahun anggaran telah mencapai angka Rp. 11.000,- lebih per US\$ 1.00. Apa artinya? Bahwa pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman yang diambil dari APBN bertambah, lebih dari apa yang dianggarkan semula. Pengeluaran Akibat Krisis Ekonomi Krisis ekonomi Indonesia yang terjadi tahun 1997 mengakibatkan meningkatnya pengangguran dari 34,5 juta orang pada tahun 1996, menjadi 47,9 juta orang

pada tahun 1999.3 Sedangkan penerimaan pajak menurun, akibat menurunnya sektor-sektor ekonomi sebagai dampak krisis itu, padahal negara harus bertanggung jawab untuk menaikkan daya beli masyarakat yang tergolong miskin. Dalam hal ini negara terpaksa mengeluarkan dana ekstra untuk program-program kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat terutama di wilayah pedesaan yang miskin itu.

5. Pengeluaran karena inflasi, penyusunan anggaran negara pada awal tahun, didasarkan menurut standar harga yang telah ditetapkan. Harga standar itu sendiri dalam perjalanan tahun anggaran, tidak dapat dijamin ketepatannya. Dengan kata lain, selama perjalanan tahun anggaran standar harga itu dapat meningkat tetapi jarang yang menurun. Apabila terjadi inflasi, dengan adanya kenaikan harga-harga itu berarti biaya pembangunan program juga akan meningkat, sedangkan anggarannya tetap sama. Semuanya ini akan berakibat pada menurunnya kuantitas dan kualitas program, sehingga anggaran negara perlu direvisi (Efendi, 2009).

b. Dampak Defisit APBN terhadap beberapa variabel makro:

(1). Dampak Terhadap Tingkat Bunga

Defisit anggaran ditandai dengan kurangnya pembiayaan pengeluaran negara karena kurangnya penerimaannya yang berasal dari pajak. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan anggaran pengeluaran pembangunan maupun pengeluaran rutin, Negara memerlukan penambahan modal, yang berarti permintaan terhadap uang meningkat. Bunga, yang

merupakan harga modal, akan mengalami tingkat keseimbangan yang lebih tinggi, atau tingkat bunga akan meningkat.

(2). Dampak Terhadap Neraca Pembayaran

Dalam ekonomi terbuka, defisit anggaran dapat mempengaruhi posisi ekspor dan impor. Dengan meningkatnya tingkat bunga, investasi dalam negeri akan menurun, yang berarti peluang modal asing cenderung masuk ke dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan investasi dalam negeri. Apabila ini terjadi, maka defisit anggaran mempunyai dua dampak yang berkaitan, yaitu : pertama, defisit anggaran akan meningkatkan defisit neraca pembayaran; kedua, dengan membengkaknya defisit neraca pembayaran, akan menurunkan nilai tukar dalam negeri terhadap mata uang asing. Sehingga menurunnya nilai rupiah terhadap valuta asing.

(3). Dampak Terhadap Tingkat Inflasi

Pengeluaran negara yang melebihi penerimaannya berarti anggaran negara mengalami ekspansif, artinya ada kecenderungan terhadap kenaikan harga-harga umum (inflasi). Karena pengeluaran negara yang digunakan untuk pembangunan proyek-proyek dengan biaya besar dan berjangka lama. Dengan meningkatnya daya beli masyarakat di satu pihak, dan belum ada output yang dihasilkan di lain pihak, akan mendorong harga-harga umum akan meningkat, yang dampaknya adalah pada inflasi.

(4). Dampak Terhadap Konsumsi dan Tabungan

Inflasi yang diakibatkan karena defisit anggaran negara itu akan mengurangi pendapatan riil masyarakat. Pengurangan pada pendapatan riil masyarakat itu akan berakibat pada pengurangan baik konsumsi maupun tabungan. Tabungan

sangat penting sekali untuk mendorong investasi. Apabila pendapatan riil ini menurun, berarti tingkat konsumsi dan tabungan riil juga menurun, padahal tingkat tabungan riil itu akan berpengaruh terhadap tingkat investasi.

(5). Dampak Terhadap Pengangguran

Pengangguran berarti penurunan tingkat kesempatan kerja. Kesempatan kerja tergantung pada besarnya investasi yang dilakukan baik oleh negara maupun masyarakat. Naiknya tingkat bunga akibat dari anggaran negara yang defisit itu, akan berdampak menurunnya gairah untuk investasi, yang berarti banyak proyek-proyek maupun perluasan proyek yang sudah ada tidak dapat dibangun, sehingga berakibat pada pemecatan tenaga kerja atau kurangnya tenaga kerja baru yang masuk dalam lapangan kerja. Dengan demikian defisit anggaran ini juga secara langsung berakibat pada kenaikan peningkatan tingkat pengangguran.

(6). Dampak Terhadap Tingkat pertumbuhan

Pertumbuhan yang meningkat adalah akibat dari meningkatnya investasi, baik dari Negara maupun masyarakat. Peningkatan investasi itu bisa terjadi, kecuali disebabkan oleh situasi keamanan yang kondusif, tetapi apabila perubahan variabel-variabel tersebut berlawanan dengan yang disebutkan diatas, terutama tingkat bunga yang tinggi akibat defisit anggaran, maka tingkat pertumbuhan yang tinggi tidak akan tercapai atau dapat dikatakan defisit anggaran itu juga mengakibatkan pada penurunan tingkat pertumbuhan.

3. Teori Inflasi

Inflasi merupakan suatu kenaikan dalam tingkat harga umum dan laju inflasi adalah tingkat perubahan dari tingkat harga umum tersebut. Inflasi juga merupakan proses kenaikan harga-harga barang secara umum yang berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu yang lama yang mengakibatkan turunya daya beli masyarakat serta jatuhnya nilai riil mata uang yang dinyatakan dalam persentase. Pengertian inflasi yang lain yaitu tingkat harga agregat naik atau inflasi adalah keadaan dimana harga barang pada umumnya mengalami kenaikan terutama disebabkan karena penawaran akan uang jauh melebihi permintaan akan uang (Primawan, 2012). Inflasi adalah suatu kenaikan harga yang terus menerus dari barang-barang dan jasa secara umum (bukan satu macam barang saja dan sesaat). Menurut definisi ini kenaikan harga yang sporadis bukan dikatakan sebagai inflasi (Admaja, 1999).

Menurut Boediono (2001 : 155-156) inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan terus-menerus. Ada berbagai cara untuk menggolongkan macam inflasi dan peenggolongan mana yang dipilih tergantung pada tujuan kita. Penggolongan pertama didasarkan atas “parah” tidaknya inflasi tersebut, maka macam-macam inflasi yaitu :

- a. Inflasi ringan (di bawah 10% setahun)
- b. Inflasi sedang (antara 10% - 30% setahun)
- c. Inflasi berat (antara 30% - 100% setahun)
- d. Hiperinflasi (di atas 100% setahun)

Penggolongan kedua adalah atas dasar penyebab awal dari inflasi. Atas dasar ini, maka inflasi dibedakan menjadi dua macam yaitu :

- a. Demand pull inflation adalah inflasi yang timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai macam barang dan jasa terlalu kuat.
- b. Cost push inflation adalah inflasi yang timbul karena kenaikan biaya produksi.

1. Teori Keynes

Keynes (dalam Admaja, 1999) mengatakan dasar pemikiran model inflasi ini adalah bahwa inflasi terjadi karena masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonomisnya, sehingga menyebabkan permintaan efektif masyarakat terhadap barang-barang (permintaan agregat) melebihi jumlah barang-barang yang tersedia (penawaran agregat), akibatnya akan terjadi *inflationary gap*.

Keterbatasan jumlah persediaan barang (penawaran agregat) ini terjadi karena dalam jangka pendek kapasitas produksi tidak dapat dikembangkan untuk mengimbangi kenaikan permintaan agregat. Oleh karenanya sama seperti pandangan kaum *monetarist*, *Keynesian models* ini lebih banyak dipakai untuk menerangkan fenomena inflasi dalam jangka pendek. Dengan keadaan daya beli antara golongan yang ada di masyarakat tidak sama (heterogen), maka selanjutnya akan terjadi realokasi barang-barang yang tersedia dari golongan masyarakat yang memiliki daya beli yang relatif rendah kepada golongan masyarakat yang memiliki daya beli yang lebih besar. Kejadian ini akan terus terjadi di masyarakat. Sehingga, laju inflasi akan berhenti hanya apabila salah satu golongan masyarakat tidak bisa lagi memperoleh dana (tidak lagi memiliki daya beli) untuk membiayai pembelian barang pada tingkat harga yang berlaku, sehingga permintaan efektif

masyarakat secara keseluruhan tidak lagi melebihi *supply* barang (*inflationary gap* menghilang).

2. Teori Kuantitas

Teori kuantitas, kenaikan dalam tingkat pertumbuhan uang sebesar 1 persen menyebabkan kenaikan 1 persen dalam tingkat inflasi. Teori ini menekankan pada peranan jumlah uang beredar dan harapan (ekspektasi) masyarakat mengenai kenaikan harga terhadap timbulnya inflasi. Inti dari teori ini adalah inflasi hanya bisa terjadi kalau ada penambahan volume uang beredar, baik uang kartal maupun giral dan laju inflasi juga ditentukan oleh laju pertumbuhan jumlah uang beredar dan oleh harapan (ekspektasi) masyarakat mengenai kenaikan harga di masa mendatang (Mankiw, 2003).

3. Teori Struktural: Model Inflasi di Negara Berkembang

Banyak studi mengenai inflasi di negara-negara berkembang, menunjukkan bahwa inflasi bukan semata-mata merupakan fenomena moneter, tetapi juga merupakan fenomena struktural atau *cost push inflation*. Hal ini disebabkan karena struktur ekonomi negara-negara berkembang pada umumnya yang masih bercorak agraris. Sehingga, guncangan ekonomi yang bersumber dari dalam negeri, misalnya gagal panen (akibat faktor eksternal pergantian musim yang terlalu cepat, bencana alam, dan sebagainya), atau hal-hal yang memiliki kaitan dengan hubungan luar negeri, misalnya memburuknya *term of trade*; utang luar negeri; dan kurs valuta asing, dapat menimbulkan fluktuasi harga di pasar domestik. Fenomena struktural yang disebabkan oleh kesenjangan atau kendala struktural dalam perekonomian di

negara berkembang, sering disebut dengan *structural bottlenecks*. *Structural bottleneck* terutama terjadi dalam tiga hal, yaitu:

1. Supply dari sektor pertanian (pangan) tidak elastis.

Hal ini dikarenakan pengelolaan dan pengerjaan sektor pertanian yang masih menggunakan metode dan teknologi yang sederhana, sehingga seringkali terjadi *supply* dari sektor pertanian domestik tidak mampu mengimbangi pertumbuhan permintaannya.

2. Cadangan valuta asing yang terbatas.

Keterbatasan cadangan valuta asing ini menyebabkan kemampuan untuk mengimpor barang-barang baik bahan baku; *input* antara; maupun barang modal yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan sektor industri menjadi terbatas pula. Belum lagi ditambah dengan adanya *demonstration effect* yang dapat menyebabkan perubahan pola konsumsi masyarakat. Akibat dari lambatnya laju pembangunan sektor industri, seringkali menyebabkan laju pertumbuhan *supply* barang tidak dapat mengimbangi laju pertumbuhan permintaan.

3. Pengeluaran pemerintah terbatas.

Hal ini disebabkan oleh sektor penerimaan rutin yang terbatas, yang tidak cukup untuk membiayai pembangunan, akibatnya timbul defisit anggaran belanja, sehingga seringkali menyebabkan dibutuhkannya pinjaman dari luar negeri ataupun mungkin pada umumnya dibiayai dengan pencetakan uang (*printing of money*). Dengan adanya *structural bottlenecks* ini, dapat memperparah inflasi di negara berkembang dalam jangka panjang, yang tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang pendek.

4. Harga Minyak Dunia

Menurut Mankiw (2009 : 80-84) bahwa jumlah permintaan (*quantity demanded*) dari suatu barang adalah jumlah barang yang rela dan mampu dibayar oleh pembeli. Banyak hal yang mempengaruhi jumlah permintaan barang, tetapi ketika kita menganalisis bagaimana pasar bekerja, salah satu penentunya adalah harga barang itu sendiri. Karena jumlah permintaan akan jatuh seiring dengan naiknya harga dan akan meningkat seiring turunnya harga, dapat dikatakan bahwa jumlah permintaan berhubungan negatif terhadap harga. Adapun variabel-variabel yang mempengaruhi permintaan suatu barang, selain harga, yaitu pendapatan, harga barang-barang terkait, selera, harapan, dan jumlah pembeli. Jumlah penawaran (*quantity supplied*) dari suatu barang adalah jumlah yang rela dan mampu dijual oleh penjual atau produsen. Banyak hal yang mempengaruhi jumlah penawaran barang, tapi ketika kita menganalisis bagaimana pasar bekerja, salah satu penentunya adalah harga dari barang itu sendiri. Karena jumlah penawaran akan meningkat dan menurun seiring naik dan turunnya harga. Dapat dikatakan bahwa jumlah penawaran berhubungan positif terhadap harga (Mankiw, 2009 : 87-91). Adapun variabel-variabel yang mempengaruhi penawaran suatu barang, selain harga barang itu sendiri, antara lain harga input, teknologi, harapan, dan jumlah penjual.

Demikian juga dengan harga minyak dunia, banyak faktor yang mempengaruhi ketidakstabilan harga minyak. Saat ini, dunia didominasi politik negara-negara besar dan perusahaan minyak tingkat dunia. Pada kondisi tertentu, kedua faktor ini sangat mempengaruhi harga pasar. Perubahan harga minyak di pasar dunia, baik

kenaikan maupun penurunan, dari waktu ke waktu dapat mempengaruhi perekonomian suatu negara, mengingat minyak merupakan salah satu kebutuhan pokok suatu negara, terutama menjadi salah satu bahan baku dalam kegiatan produksi. Fluktuasi harga minyak ini harus senantiasa dipantau oleh pihak-pihak yang berkepentingan, karena harga ini dapat mempengaruhi kebijakan suatu negara, terutama kebijakan dalam bidang ekonomi dan energi (Rosit, 2010).

Naiknya harga minyak dunia akan memberikan dampak kenaikan pada harga bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah Indonesia terpaksa mengambil keputusan yaitu menaikkan harga BBM. Rendahnya harga BBM disaat harga minyak dunia sedang naik, merupakan salah satu sumber defisit APBN. Oleh karena itu, ada rencana untuk menaikkan harga BBM sampai tidak lagi diperlukan subsidi BBM. Jika harga minyak dunia naik, namun harga BBM tidak dinaikkan, maka subsidi BBM cukup besar dan ini adalah selisih biaya untuk menutupi perbedaan harga jual dan biaya produksinya.

Karena BBM merupakan bahan dasar untuk melakukan kegiatan di segala sector dan kehidupan, kenaikan harga BBM yang drastis akan menaikkan harga barang dan jasa termasuk kebutuhan sehari-hari rakyat banyak. Sebenarnya kelompok rumah tangga miskin yang paling menderita atas beban kenaikan harga BBM, karena disamping kebutuhan bahan bakar dan transportasi, kebutuhan-kebutuhan lain pasti naik pula, sedangkan penghasilan mereka relatif kecil (Suparmoko, 2002 : 199).

5. Teori Nilai Tukar

Mankiw (2003 : 123-125) menyebutkan bahwa kurs/nilai tukar (exchange rate) antara dua negara adalah tingkat harga yang disepakati oleh penduduk kedua negara untuk saling melakukan perdagangan. Dalam literatur ekonomi, nilai tukar mata uang suatu negara dapat dibedakan menjadi dua yaitu nilai tukar nominal dan nilai tukar riil. Kurs nominal adalah harga relatif dari mata uang dua negara. Misalnya jika kurs antara dolar AS dan rupiah adalah 10.000 rupiah per dolar, maka kita dapat menukar 1 dolar untuk 10.000 rupiah di pasar uang. Orang Indonesia yang ingin memiliki dolar akan membayar 10.000 rupiah untuk setiap dolar yang dibelinya. Orang Amerika yang ingin memiliki rupiah akan mendapatkan 10.000 rupiah untuk setiap dolar yang ia bayar. Ketika orang mengacu pada kurs diantara kedua negara, mereka biasanya mengartikan kurs nominal.

Rasio tingkat harga merupakan perbandingan antara tingkat harga di dalam negeri dengan tingkat harga di luar negeri. Jika kurs riil tinggi, harga barang-barang luar negeri relatif lebih murah, dan barang-barang domestik relatif lebih mahal. Jika kurs riil rendah, barang-barang luar negeri relatif lebih mahal dan barang-barang domestik relatif lebih murah.

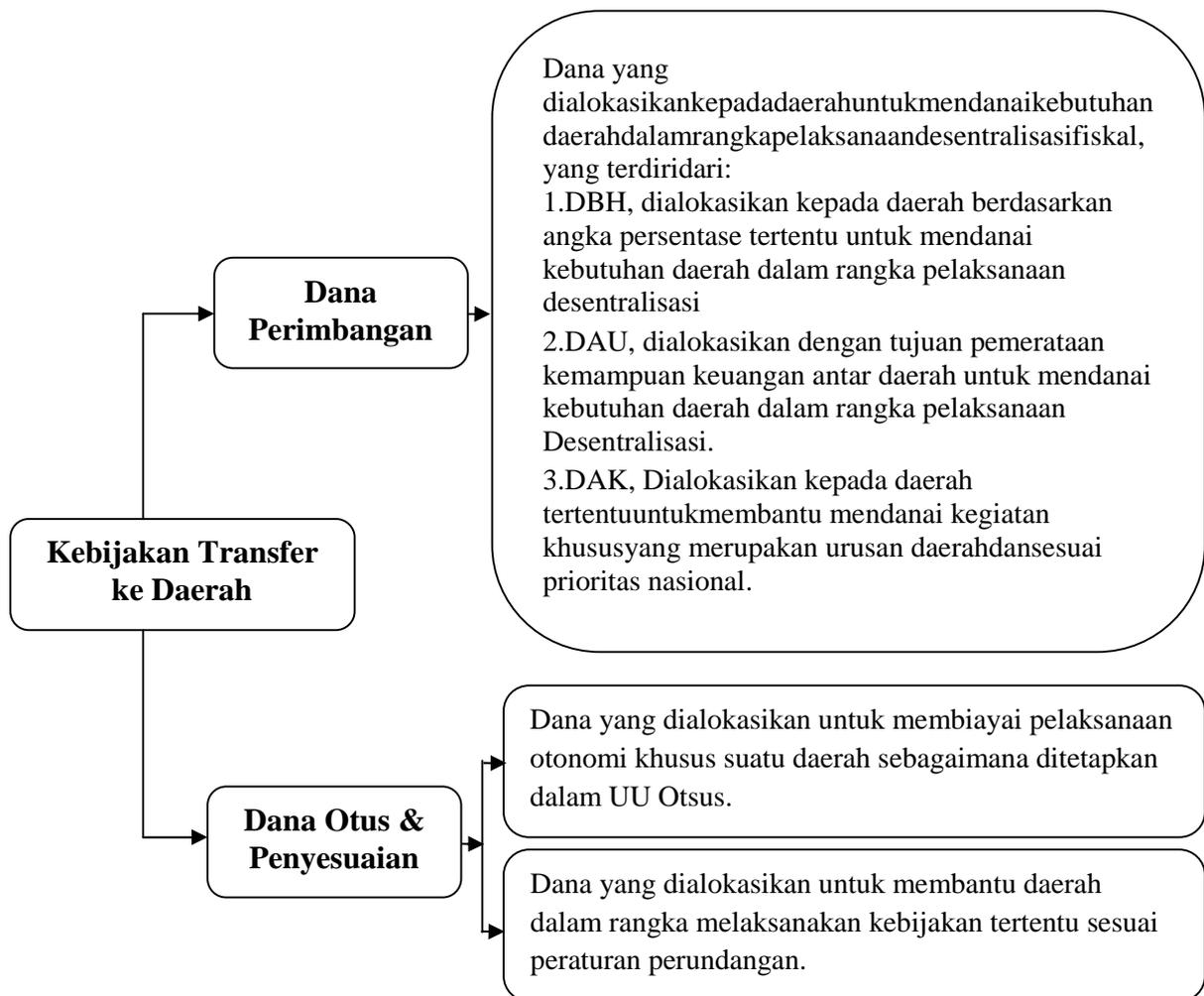
Nilai mata uang dari suatu negara yang cenderung menurun menunjukkan negara tersebut mempunyai tingkat inflasi yang tinggi. Inflasi suatu negara yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain, berarti harga barang-barang di negara tersebut naik lebih cepat dari negara lain. Hal ini akan mengakibatkan ekspor akan turun dan impor akan naik karena harga barang-barang negara bersangkutan lebih

mahal bila dibandingkan dengan barang-barang negara lain. Dengan demikian, *supply* dari mata uang asing akan turun dan *demand* akan naik, sehingga nilai mata uang asing akan naik sedangkan nilai mata uang domestik akan turun atau terdepresiasi (Rosit, 2010).

Berdasarkan beberapa literatur, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pergerakan nilai tukar, yaitu faktor fundamental, faktor teknis, dan sentimen pasar (Jeff Madura, 1993; dalam Arifin, 1998). Faktor fundamental berkaitan dengan indikator-indikator ekonomi seperti inflasi, suku bunga, perbedaan relatif pendapatan antar-negara, ekspektasi pasar dan intervensi Bank Sentral. Faktor teknis berkaitan dengan kondisi penawaran dan permintaan devisa pada saat-saat tertentu. Apabila ada kelebihan permintaan, sementara penawaran tetap, maka harga valas akan naik dan sebaliknya. Sentimen pasar lebih banyak disebabkan oleh rumor atau berita-berita politik yang bersifat insidentil, yang dapat mendorong harga valas naik atau turun secara tajam dalam jangka pendek. Apabila rumor atau berita-berita sudah berlalu, maka nilai tukar akan kembali normal.

6. Kebijakan Transfer ke Daerah Tahun 2001

Pelaksanaan urusan perimbangan keuangan pusat dan daerah terkait dengan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pelaksanaan desentralisasi diwujudkan melalui pemberian bantuan dalam bentuk transfer dana dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.



Sumber: Kementerian Keuangan RI

Gambar 6. Pengertian Kebijakan Transfer ke Daerah

Mekanisme penyaluran dana dimaksud sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2007 menggunakan istilah belanja ke daerah, dimana penyaluran dana dilakukan dengan melibatkan pihak pemda bersangkutan. Namun sejak awal tahun 2008, seiring dengan penunjukan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran bagian Anggaran 070 (Dana Perimbangan) dan Bagian Anggaran 071 (Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian), maka mekanisme penyaluran diubah dengan menggunakan nomenklatur Transfer ke Daerah. Transfer ke Daerah (TKD) merupakan mekanisme baru dimana alokasi dana untuk pemda disalurkan secara langsung melalui pemindahbukuan dari Rekening

Kas Umum Negara pada Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, ke Rekening Kas Umum Daerah, tanpa adanya keterlibatan pemda sebagai penerima dana dalam proses pencairan dana. (LAN, 2008)

Berdasarkan Permenkeu Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, ditegaskan bahwa Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) bertugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Urusan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah tersebut dilaksanakan oleh salah satu unit organisasi di bawah DJPK yaitu Direktorat Dana Perimbangan.

Direktorat Dana Perimbangan bertugas menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, perhitungan alokasi, standarisasi, bimbingan teknis, dan pelaksanaan di bidang Transfer ke Daerah (Pasal 1166 PMK Nomor 100/2008).

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Direktorat Dana Perimbangan diantaranya memiliki fungsi pelaksanaan transfer dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana otonomi khusus dan penyesuaian.

Adapun unit yang melaksanakan fungsi dimaksud adalah Subdirektorat Pelaksanaan Transfer I dan Subdirektorat Pelaksanaan Transfer II. Subdirektorat Transfer I, mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, koordinasi fasilitasi, dan pemantauan/konfirmasi atas pelaksanaan transfer ke daerah serta penyusunan laporan realisasi anggaran TKD, khususnya Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Otonomi

Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otsus Papua dan Papua Barat serta Dana Penyesuaian. Subdirektorat Pelaksanaan Transfer II mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, koordinasi fasilitasi, dan pemantauan/konfirmasi atas pelaksanaan transfer ke daerah serta penyusunan laporan realisasi anggaran transfer ke daerah, khususnya dana bagi hasil (DBH) pajak, DBH sumber daya alam, dan DBH cukai hasil tembakau (LAN, 2008).

B. Hubungan Antar Variabel

1. Hubungan Inflasi dengan Defisit APBN

Masyarakat di negara berkembang seperti Indonesia yang mempunyai pendapatan per kapita rendah, dikenal mempunyai daya beli yang rendah pula. Sedangkan barang-barang dan jasa-jasa yang dibutuhkan, harganya sangat tinggi karena sebagian produksinya mempunyai komponen impor, sehingga masyarakat yang berpendapatan rendah tidak mampu membeli barang dan jasa tersebut. Barang dan jasa tersebut misalnya listrik, sarana transportasi, BBM, dan lain sebagainya. Sama halnya saat terjadi inflasi yang menyebabkan harga-harga barang dan jasa menjadi meningkat. Apabila dibiarkan saja menurut mekanisme pasar, barang-barang itu pasti tidak mungkin terjangkau oleh masyarakat dan mereka akan tetap terpuruk. Oleh karena itu, negara memerlukan pengeluaran untuk mensubsidi barang-barang tersebut agar masyarakat miskin bisa ikut menikmati.

Penyusunan anggaran negara pada awal tahun, didasarkan menurut standar harga yang telah ditetapkan. Harga standar itu sendiri dalam perjalanan tahun anggaran,

tidak dapat dijamin ketepatannya. Dengan kata lain, selama perjalanan tahun anggaran standar harga itu dapat meningkat tetapi jarang yang menurun. Apabila terjadi inflasi, dengan adanya kenaikan harga-harga itu berarti biaya pembangunan program juga akan meningkat, sedangkan anggarannya tetap sama. Semuanya ini akan berakibat pada menurunnya kuantitas dan kualitas program, sehingga anggaran negara perlu direvisi. Akibatnya, negara terpaksa akan mengeluarkan dana untuk eskalasi dalam rangka menambah standar harga itu. Meningkatnya pengeluaran akibat inflasi inilah yang dapat mengakibatkan defisit APBN meningkat.

Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan terus-menerus. Secara tidak langsung, melalui pertumbuhan ekonomi, naiknya harga barang dan jasa akan mengakibatkan turunnya daya beli dan konsumsi masyarakat. Hal ini menjadikan permintaan menurun dan produksi menjadi ikut menurun. Output riil menjadi rendah yang akhirnya akan berdampak pada turunnya PDB riil suatu negara dan pertumbuhan ekonomi akan terpengaruh sehingga menjadi rendah. Selanjutnya, pendapatan negara akan menurun dan membawa konsekuensi naiknya defisit APBN karena dengan pendapatan yang menurun negara harus tetap menyediakan kebutuhan publik rakyatnya.

2. Hubungan Harga Minyak Dunia dengan Defisit APBN

Harga minyak dunia memiliki hubungan yang sangat kuat dengan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), sebagaimana estimasi yang dilakukan oleh Bank Dunia untuk kenaikan harga minyak sebesar US\$ 1 per barel akan meningkatkan defisit anggaran sebesar US\$ 100 juta. Selanjutnya untuk

setiap kenaikan harga minyak dunia sebesar US\$ 10 per barel akan meningkatkan anggaran (pendapatan) pemerintah sebesar US\$ 1 miliar (0,3% PDB), dan secara keseluruhan defisit pemerintah hanya meningkat sebesar US\$ 500 juta (0,15% PDB) dan kondisi ini bukanlah suatu ancaman yang terlalu serius untuk stabilitas makro ekonomi Indonesia. Membandingkan hasil kalkulasi yang dilakukan oleh Bank Dunia menunjukkan bahwa ada suatu tingkat kenaikan harga minyak yang berada dalam posisi impas *break event point* yaitu pengeluaran dan pendapatan yang terkait dengan minyak dalam posisi berimbang. Titik impas tersebut dapat berada dalam rentang kenaikan antara 1 hingga 10 US\$ yang sifatnya akan dinamis tergantung pada tingkat produksi minyak, nilai tukar, kebutuhan domestik dan tingkat impor (Rosit, 2010).

Produksi minyak mentah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. Hal ini terjadi selain karena penurunan produksi secara alamiah dari sumur-sumur minyak yang sudah tua, juga adanya gangguan produksi akibat bencana alam seperti banjir, serta kegiatan investasi bidang perminyakan yang belum mampu meningkatkan produksi minyak secara signifikan. Untuk mengantisipasi penurunan produksi minyak, pemerintah berupaya meningkatkan produksi minyak dengan memberikan insentif fiskal, antara lain berupa pembebasan bea masuk dan pajak pertambahan nilai peralatan eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi dan gas alam (Badan Kebijakan Fiskal, 2009: 11-12).

Secara langsung, naiknya harga minyak dunia misalnya akibat krisis politik Timur Tengah, secara langsung berpengaruh terhadap harga minyak di Indonesia atau

Indonesian *Crude Price* (ICP). Dalam penyusunan ABPN, pemerintah juga menetapkan asumsi harga ICP dan target produksi (lifting) Indonesia. Misalnya lifting Indonesia tidak sesuai atau jauh dari asumsi lifting Indonesia yang ditargetkan. pemerintah mau tidak mau harus mengimpor minyak untuk memenuhi volume kebutuhan minyak di Indonesia. Dengan mengandalkan minyak impor inilah yang menjadi sebab ketergantungan Indonesia yang berlebihan terhadap negara eksportir minyak. Dengan demikian, ketika terjadi sedikit saja gejolak politik dan sosial ekonomi di negara eksportir yang berpengaruh pada fluktuasi harga minyak dunia, maka hal tersebut secara ekstrem berimplikasi terhadap stabilitas ICP dan juga surplus-defisit APBN Indonesia (Djunedi, 2008).

Apabila fluktuasi harga ICP telah melampaui patokan APBN, maka harga minyak tersebut telah berpengaruh signifikan terhadap defisit APBN. Hal ini karena setiap kenaikan minyak US\$ 1 per barel, akan menggerus subsidi yang cukup besar. Pemerintah harus menyuntik anggaran yang tidak sedikit untuk menutupi kekurangan BBM dan kuota subsidi akan terus terkuras, atau melampaui ekspektasi penghematan pemerintah, maka APBN akan mengalami defisit. Dan hal ini secara serta-merta akan memicu gonjangan ekonomi turunan di berbagai sektor yang berhubungan dengan BBM. Harga minyak yang terus meningkat akan semakin menambah besarnya defisit APBN (Djunedi, 2008).

Sedangkan secara tidak langsung, kenaikan harga minyak dunia akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi meningkat, namun dapat juga mengakibatkan pertumbuhan ekonomi menjadi menurun. Makin tinggi kenaikan

harga minyak serta semakin lama harga tinggi tersebut bertahan, makin besar dampak makroekonominya. Bagi negara pengekspor neto (ekspor minyaknya lebih besar daripada impor minyaknya), kenaikan harga minyak langsung menaikkan pendapatan nasional riil melalui pendapatan ekspor yang lebih besar. Sedangkan bagi negara importer neto minyak, kenaikan harga minyak yang tinggi akan menyebabkan pengeluaran untuk minyak naik, sehingga pengeluaran untuk barang ataupun jasa lainnya menjadi berkurang. Bagi para produsen yang menggunakan minyak sebagai input dalam kegiatan produksi mereka, hal ini akan mengakibatkan naiknya biaya input. Untuk mengurangi tingginya biaya input produsen biasanya akan melakukan pengurangan tenaga kerja untuk dapat menekan besarnya biaya input. Hal ini tentu saja akan menimbulkan dampak pengangguran (unemployment). Naiknya biaya input menjadikan harga output atau hasil barang dan jasa hasil produksi menjadi mahal. Kenaikan harga barang dan jasa ini dapat menimbulkan gejolak inflasi. Akibatnya, permintaan maupun output menjadi menurun yang hingga akhirnya mempengaruhi PDB negara tersebut (Nizar, 2012).

Kenaikan harga minyak juga dapat merubah neraca perdagangan antar negara dan nilai tukar. Pengimpor neto minyak biasanya mengalami memburuknya neraca pembayaran, serta menekan nilai tukar ke bawah. Akibatnya impor menjadi lebih mahal dan ekspor berkurang nilainya, mengakibatkan menurunnya pendapatan nasional riil. Tanpa perubahan kebijakan bank sentral dan kebijakan moneter pemerintah, dollar akan condong menjadi lebih mahal karena negara-negara pengekspor minyak menggunakan denominasi dollar dalam arus perdagangannya. Dengan kombinasi inflasi dan pengangguran yang tinggi, nilai tukar rendah, dan

output riil yang rendah menjadikan pertumbuhan ekonomi menurun (Surjadi, 2006). Pertumbuhan ekonomi yang menurun dapat mengurangi penerimaan negara, namun disisi lain penyediaan barang publik oleh pemerintah dan pembayaran utang luar negeri tetap harus dilakukan (Nizar, 2012).

3. Hubungan Nilai Tukar dengan Defisit APBN

Nilai tukar rupiah merupakan satu indikator ekonomi makro yang terkait dengan besaran APBN. Asumsi nilai tukar rupiah berhubungan dengan banyaknya transaksi dalam APBN yang terkait dengan mata uang asing, seperti penerimaan pinjaman dan pembayaran utang luar negeri, penerimaan minyak dan pemberian subsidi BBM. Dengan demikian, variabel asumsi dasar ekonomi makro tersebut sangat menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran negara, termasuk dana perimbangan, serta besarnya pembiayaan anggaran (Teguh, 2008).

Indonesia sebagai salah satu negara yang melakukan pinjaman luar negeri, mengalami masalah apabila ada gejolak nilai tukar setiap tahunnya. Masalah ini disebabkan karena nilai pinjaman dihitung dengan valuta asing, sedangkan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman dihitung dengan rupiah. Apabila nilai tukar rupiah menurun (terdepresiasi) terhadap mata uang dollar AS, maka yang akan dibayarkan juga membengkak dan hal ini akan membebani APBN karena pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman yang diambil dari APBN bertambah, lebih dari apa yang dianggarkan semula atau dengan kata lain pembayaran utang luar negeri akan melonjak (Kuncoro, 2011). Dengan demikian, melonjaknya pembayaran utang luar negeri akan meningkatkan defisit APBN negara.

Hubungan nilai tukar dengan defisit APBN secara tidak langsung, melalui pertumbuhan ekonomi, dapat dilihat saat nilai tukar dihubungkan dengan kegiatan ekspor dan impor. Saat nilai rupiah melemah atau terdepresiasi terhadap dollar Amerika (USD), hal ini akan berdampak pada kegiatan ekspor. Terdepresiasinya rupiah terhadap dolar Amerika akan menambah keuntungan bagi eksportir sehingga hal ini akan merangsang eksportir tersebut untuk melakukan kegiatan ekspor lebih banyak lagi karena harga barang ekspor dari Indonesia relatif akan lebih murah di luar negeri, sementara keuntungan yang diperoleh eksportir lebih besar. Dengan demikian, volume ekspor akan meningkat dan hal ini mengakibatkan penerimaan ekspor akan meningkat pula. Selain itu, meningkatnya ekspor juga akan dapat meningkatkan cadangan devisa negara. Sebaliknya, apabila nilai tukar rupiah menguat (terapresiasi) terhadap dollar Amerika maka eksportir akan memperoleh keuntungan yang relatif lebih kecil (Teguh, 2008).

Nilai tukar merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan apakah barang-barang di negara lain lebih murah atau lebih mahal dari barang-barang yang diproduksi di dalam negeri. Melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika (terdepresiasi) mengakibatkan harga barang-barang di luar negeri relatif lebih mahal dan harga-harga domestik relatif lebih murah, sehingga impor cenderung menurun. Hal ini akan mendorong permintaan (*demand*) untuk barang-barang domestik meningkat, sehingga produksi dalam negeri meningkat dan akan berdampak pada naiknya output riil yang kemudian akan meningkatkan PDB riil. Peningkatan PDB riil dan kegiatan ekspor selanjutnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi akan

meningkatkan pendapatan negara dan pendapatan negara yang meningkat akan dapat mengurangi defisit APBN Indonesia (Kuncoro, 2011).

4. Hubungan Defisit APBN Tahun Sebelumnya dengan Defisit APBN

Defisit anggaran negara adalah selisih antara penerimaan negara dan pengeluarannya yang cenderung negatif, artinya bahwa pengeluaran negara lebih besar dari penerimaannya. Defisit APBN tahun sebelumnya merupakan Defisit APBN yang terjadi pada tahun sebelum APBN tahun berjalan. Besaran Defisit APBN tahun sebelumnya dapat mempengaruhi defisit APBN tahun berjalan dimana apabila besaran defisit APBN tahun sebelumnya tinggi maka defisit tahun berjalan akan meningkat sebagai akibat dari pembengkakan penggunaan anggaran untuk menutupi defisit yang terjadi pada tahun sebelumnya.

5. Hubungan Transfer ke Daerah dengan Defisit APBN

Transfer ke Daerah (TKD) merupakan mekanisme baru dimana alokasi dana untuk pemda disalurkan secara langsung melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara pada Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, ke Rekening Kas Umum Daerah, tanpa adanya keterlibatan pemda sebagai penerima dana dalam proses pencairan dana.

Mekanisme penyaluran dana dimaksud sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2007 menggunakan istilah belanja ke daerah, dimana penyaluran dana dilakukan dengan melibatkan pihak pemda bersangkutan. Namun sejak awal tahun 2008, seiring dengan penunjukan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran bagian Anggaran 070 (Dana Perimbangan) dan Bagian

Anggaran 071 (Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian), maka mekanisme penyaluran diubah dengan menggunakan nomenklatur Transfer ke Daerah. Kebijakan yang diambil pemerintah pada tahun 2001 tersebut menyebabkan beban APBN semakin Meningkat yang otomatis meningkatkan pengeluaran pemerintah, sehingga transfer ke daerah menyebabkan deficit APBN meningkat.

C. Studi Empiris

Beberapa penelitian sebelumnya yang mendasari penelitian ini:

Tabel 3. Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Luis A.V. Catão (2004)	Fiscal deficits and inflation	Teori makroekonomi mendalilkan bahwa defisit fiskal persisten adalah inflasi. Namun penelitian empiris telah memiliki keberhasilan yang terbatas dalam mengungkap hubungan ini. Makalah ini membahas masalah dalam rentang data yang lebih luas dan pendekatan pemodelan baru yang mengga bungkan dua fitur kunci dari teori. Tidak seperti studi sebelumnya, kita model inflasi sebagai non-linear yang terkait dengan defisit fiskal melalui basis pajak inflasi dan memperkirakan hubungan ini secara intrinsik dinamis, menggunakan teknik panel yang secara eksplisit membedakan antara efek jangka pendek dan jangka panjang dari defisit fiskal. Hasil mencakup 107 negara selama 1960-2001 menunjukkan hubungan positif yang kuat antara defisit dan inflasi antara tinggi inflasi dan kelompok negara berkembang, tetapi tidak di antara inflasi rendah negara maju.
2	Fernando Pérez de Gracia (2002)	Do oil price shocks matter? Evidence for some European countries	Makalah ini menganalisis minyak harga-makroekonomi hubungan dengan cara menganalisa dampak dari harga minyak terhadap inflasi dan produksi industri indeks untuk banyak negara Eropa menggunakan data kuartalan untuk periode 1960-1999. Pertama, kami menguji kointegrasi memungkinkan untuk istirahat struktural antara variabel-variabel. Kedua, dan dalam rangka untuk menjelaskan hubungan non-

			<p>linear mungkin, kita menggunakan transformasi data yang berbeda harga minyak. Hasil utama menunjukkan bahwa harga minyak memiliki efek permanen pada inflasi dan jangka pendek tetapi efek asimetris pada tingkat pertumbuhan produksi. Selanjutnya, perbedaan yang signifikan ditemukan antara tanggapan dari negara-negara guncangan ini.</p>
3	Paul Evans (1986)	Is the dollar high because of large budget deficits?	<p>Secara luas diyakini bahwa dolar AS telah tinggi dalam beberapa tahun terakhir karena defisit anggaran AS yang besar. Menggunakan tiga teknik statistik, makalah ini menunjukkan bahwa kepercayaan tidak memiliki dukungan empiris. Kesetaraan Ricardian dapat menjelaskan hubungan positif antara defisit anggaran dan nilai tukar dolar.</p>
4	Najid Ahmad (2013)	The Role of Budget Deficit in the Economic Growth of Pakistan	<p>Tujuan dasar dari tulisan ini adalah untuk menyelidiki hubungan antara Defisit Anggaran dan Produk Domestik Bruto dari Pakistan. Ada tiga pandangan tentang hubungan ini. Keynesian mengatakan bahwa ada hubungan positif antara defisit anggaran dan pertumbuhan ekonomi, sementara neo-klasik pandangan bahwa ada hubungan terbalik antara defisit anggaran dan pertumbuhan ekonomi. Ricardian mengatakan bahwa ada hubungan netral antara anggaran defisit dan pertumbuhan ekonomi. Sebuah data time series periode 1971-2007 telah digunakan untuk memeriksa hubungan antara defisit anggaran dan pertumbuhan ekonomi Pakistan. PDB diambil sebagai variabel dependen, FDI dan defisit anggaran sebagai variabel independen. Uji ADF telah digunakan untuk memeriksa stasioner data. Semua variabel mendapatkan stasioner pada tingkat signifikansi 5%. Hasil uji kausalitas Granger menunjukkan bahwa ada kausalitas dua arah berjalan dari defisit anggaran terhadap PDB dan PDB untuk defisit anggaran.</p>
5	Wiwin Haerani (2012)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Defisit Apbn di Indonesia Periode Tahun 2001-2010	<p>dalam skripsinya meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi defisit apbn di indonesia. Dari hasil analisis data bahwa secara langsung inflasi, nilai tukar rupiah dan harga minyak dunia serta pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap defisit APBN sedangkan faktor lain berpengaruh secara tidak langsung.</p>

6	Teguh Pamuji TNH (2008)	Analisis Dampak Defisit Anggaran Terhadap Ekonomi Makro di Indonesia (tahun 1993 -2007)	Besarnya defisit anggaran terbukti positif mempengaruhi besarnya utang luar negeri baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek, besarnya defisit anggaran dan utang luar negeri terbukti memiliki tanda positif ,tetapi tidak signifikan mempengaruhi besarnya cicilan bunga dan pokok. Tetapi dalam jangka panjang besarnya defisit anggaran dan utang luar negeri terbukti berpengaruh positif dan signifikan mempengaruhi besarnya pokok dan bunga. Ketidaksignifikannya dalam jangka panjang dikarenakan utang luar negeri yang dipinjam oleh Negara Indonesia, adalah utang luar negeri yang sangat lunak. Dimana pembayaran pokok dan bunganya dalam waktu yang relative lama, dengan tingkat bunga yang relatif rendah.
7	Peserta Diklatpim IV Angkatan 127 Kelompok II (2010)	Upaya Memaksimalkan Pelaksanaan Transfer ke Daerah Pada Direktorat Dana Perimbangan	Masalah utama dalam tulisan ini adalah kurang maksimalnya pelaksanaan transfer ke daerah pada Direktorat Dana Perimbangan tahun anggaran 2009. Faktor penyebab munculnya masalah ini meliputi pertama, koordinasi yaitu lemahnya koordinasi dengan instansi teknis terkait dalam penyediaan data sebagai dasar penerbitan PMK alokasi. Kedua, SDM yaitu rendahnya pemahaman pegawai pada peraturan tentang transfer ke daerah. Ketiga, sarana dan prasarana yaitu terbatasnya kualitas dan kuantitas komputer dan printer. Keempat, data dan informasi yaitu kurang akuratnya data penerimaan negara dari instansi teknis terkait yang akan dibagikan. Kelima, sistem dan prosedur yaitu banyaknya pihak yang terkait dalam prosedur pencairan baik internal maupun eksternal DJPK. Keenam, penyebab eksternal yaitu kurangnya pengetahuan pemda terhadap peraturan transfer ke daerah.

Sumber: kumpulan Artikel dan Jurnal Ekonomi